



PAPER – OPEN ACCESS

## Dialektika Masyarakat Dan Bencana di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie

Author : Muhammad Sahlan dkk.,  
DOI : 10.32734/lwsa.v2i1.627  
Electronic ISSN : 2654-7066  
Print ISSN : 2654-7058

*Volume 2 Issue 3 – 2019 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



## Dialektika Masyarakat Dan Bencana di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie

*Community Dialectics and Disasters in Tangse District, Pidie Regency*

Muhammad Sahlan<sup>a</sup>, Siti Ikramatoun<sup>b</sup>, Khairul Amin<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Program Studi Sosiologi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

<sup>b</sup>Program Studi Sosiologi Agama, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

<sup>c</sup>Guru Sosiologi, Madrasah Aliyah Negeri 1 Pidie, Sigli, Indonesia

Email : [sahlan.hanafiah@gmail.com](mailto:sahlan.hanafiah@gmail.com), [siti.ikramatoun@gmail.com](mailto:siti.ikramatoun@gmail.com), [alqonz90@gmail.com](mailto:alqonz90@gmail.com)

### Abstract

*Tangse is one of the sub-districts that located in Pidie district. About 190 km from Banda Aceh the capital of Aceh province. Since 2011 until 2018, disasters have become an annual routine of Tangse society, from landslides to flash floods coming every year. In this regards, this paper aims to discuss the dialectics of the community with disasters that befall in Tangse. The Data in this paper derived from observations, interviews and literature studies, then analyzed using a sociological approach. The results of this study found that many things have been done by local governments to cope with disasters. From prevention to reduce the risk of disasters that befall the community, when disasters are increasingly happening, the perspective of the community towards disasters begins to change. Now for some people in Tangse, disasters are not only viewed as calamities but also seen as "benefits". As a result, although the public has a sense of disaster risk, it does not make the community stop the activity that invites disaster in the land of Tangse.*

*Keywords: Dialectics; Society; Disasters; Tangse;*

### Abstrak

Tangse merupakan salah satu kecamatan yang berada dikawasan pegunungan Kabupaten Pidie, berjarak sekitar 190 km dari Kota Banda Aceh, Ibukota Provinsi Aceh. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, bencana telah menjadi langganan masyarakat Tangse, mulai dari tanah longsor hingga banjir bandang silih berganti menghampiri masyarakat. Terkait hal itu, tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang dialektika masyarakat terhadap bencana yang terus menerus terjadi selama beberapa tahun belakangan di Kecamatan Tangse. Data dalam tulisan ini bersumber dari hasil observasi, wawancara dan studi literatur yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan ditemukan bahwa telah banyak hal yang diupayakan pemerintah daerah berserta unsur-unsur terkait untuk menanggulangi datangnya bencana, mulai dari pencegahan hingga mengurangi resiko bencana yang menimpa masyarakat. Namun, ketika bencana semakin akrab menyapa masyarakat, maka pergeseran cara pandang masyarakat terhadap bencana pun terjadi. Jika pada awalnya bencana dilihat sebagai suatu musibah dan masyarakat selalu menganggap diri mereka sebagai korban, kini bagi sebagian masyarakat tangse, bencana tidak hanya dilihat sebagai musibah tetapi juga sebagai "berkah". Akibatnya, meski ada kesadaran tentang resiko bencana, namun hal itu tidak membuat masyarakat menghentikan aktivitas yang mengundang datangnya bencana di bumi Tangse.

Kata Kunci: Dialektika, Masyarakat, Bencana, Tangse

### 1. Pendahuluan

Sejak Maret 2011 ketika bencana longsor dan banjir bandang menghantam Kecamatan Tangse yang kemudian disusul oleh bencana-bencana serupa setiap tahunnya membuat kehidupan masyarakat berangsur-angsur mulai berubah. Bahkan hingga dipenghujung tahun 2018 bencana banjir yang sama kembali menghampiri masyarakat. Tangse yang dulu sempat menjadi salah satu daerah primadona di Aceh dengan hasil alamnya yang melimpah, dalam sekejap berubah menjadi kawasan rawan bencana. Bencana demi bencana menjadi rutinitas tahunan. "Tiada tahun tanpa bencana, tiada tahun tanpa banjir", demikian penuturan Tokoh Masyarakat Tangse.

Secara sosiologis, fenomena bencana yang menimpa Kecamatan Tangse telah memposisikan pemahaman masyarakat terkait bencana sangat terikat dengan konteks ruang dan waktu. Irwan Abdullah [1] menyatakan bahwa keragaman sifat eksternal suatu bencana dan kompleksitas internal menentukan suatu fenomena alam berubah menjadi bencana. Maka ketika suatu fenomena alam berubah menjadi bencana yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, idealnya fenomena tersebut dilihat dalam tiga persepektif agar pemahaman tentang fenomena bencana menjadi lebih komprehensif, yaitu sebagai proses, konteks dan ranah.

Ketiga hal tersebut menjadi peting karena pada dasarnya peristiwa bencana telah mengungkap rahasia tentang kelemahan dan kekuatan tersembunyi dari masyarakat. Kekuatan ini dalam situasi yang “normal” seringkali tertutup oleh sistem dan struktur membungkus masyarakat.

Ketika kehidupan sosial masyarakat yang telah berjalan “normal” terganggu oleh bencana maka secara alamiah dibutuhkan adaptasi oleh masyarakat untuk mengembalikan kehidupan sosial seperti sediakala. Namun ketika fenomena bencana menjadi semakin kompleks dan menjadi rutinitas, maka akan terjadi negosiasi-negosiaai yang bersifat kultural sekaligus struktural dalam proses adaptasi sosial masyarakat tersebut untuk menuju pada kondisi keseimbangan baru. Merujuk pada Giddens [2] negosiasi sosial dalam masyarakat pada masa bencana maupun pasca bencana dalam dilihat sebagai proses reproduksi kehidupan sosial di mana bencana membawa ketidaksesuaian antara realitas subjektif dengan realitas objektif masyarakat. Sehingga akan ada penyesuaian terhadap realitas melalui proses reproduksi dan transformasi lingkungan sosial melalui interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat mengenai dirinya serta lingkungan tempat mereka tinggal.

Pada kasus bencana banjir di daerah Tangse, rutinitas bencana, konteks geografis dan mata pencaharian masyarakat menjadi variabel yang dominan. Oleh karena itu sangat penting dilihat bagaimana dialektika masyarakat dan bencana yang rutin terjadi tersebut dapat menciptakan perubahan cara pandang masyarakat terhadap bencana. Kemudian perubahan tersebut akan dilihat sebagai sesuatu yang mengalami serangkaian proses penguatan atau penurunan akibat bencana yang menghampiri. Selain itu, konteks sosial yang melatar belakangi adanya serangkaian kontestasi dan negosiasi ide, gagasan, nilai, dan praktik tanggap bencana seperti keberadaan institusi dan tokoh tertentu menjadi hal yang turut berkontribusi dalam proses dialektika masyarakat terhadap bencana. Untuk itu, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana perubahan pandangan masyarakat Tangse terhadap bencana.

## 2. Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. Pemilihan Tangse sebagai lokasi penelitian karena secara demografis dan geografis Tangse adalah salah satu kecamatan yang seringkali terkena Bencana dalam beberapa tahun terakhir. Tangse juga menjadi wilayah rawan bencana karena tingginya angka penyalahgunaan fungsi hutan oleh beberapa kelompok yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, Tangse termasuk salah satu wilayah dengan tingkat kerusakan hutan yang tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Pidie dan Aceh umum.

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Kualitatif. Sebagaimana karakter penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen kunci dan bersifat utama dalam proses pengumpulan data.. Beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu observasi, focus group discussion (FGD), wawancara mendalam dan kajian literatur. Setelah semua data dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti diatas, maka peneliti akan melakukan analisa data secara induktif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Bencana di Kecamatan Tangse

Secara geografis, Kecamatan Tangse berbatasan dengan Kecamatan Keumala di sisi utara, Aceh Barat di sebelah selatan, Aceh Besar dibagian Barat dan Kecamatan Mane di sisi timur. Luas wilayahnya  $\pm 750$  KM<sup>2</sup> dengan jumlah Penduduk 26.235 jiwa, terdiri dari 4 mukim, 28 gampong dan berada di atas ketinggian 600-1200 mdpl. Sejak dulu Tangse telah terkenal sebagai daerah penghasil beras terlezat di Aceh, aromanya yang wangi dan teksturnya yang pulen membuat beras Tangse menjadi komoditas utama masyarakat kala itu. Namun kisah itu kini seolah tinggal kenangan, Tangse yang sempat menjadi primadona, saat ini lebih dikenal sebagai daerah “langganan bencana”. Beras Tangse pun sudah tidak lagi diproduksi, yang tersisa hanya “merk”nya saja.

Pada Maret 2011 berbagai media lokal dan nasional ramai-ramai memberitakan bahwa musibah banjir bandang baru saja “berkunjung” ke Gampong mereka, tepatnya pada 10 Maret 2011. Tidak hanya Gampong Blang Pandak, masyarakat Gampong Layan, Gampong Peunalom I, Peunalom II dan beberapa Gampong sekitar juga ikut porak-poranda akibat musibah yang sebenarnya tidak pernah diharap kehadirannya. Kala itu, 24 warga merenggang nyawa, 645 rumah warga rusak serta sejumlah fasilitas publik semisal sekolah dan tempat ibadah rusak parah. Duka 2011 belum sembuh, musibah yang sama kembali menjamah Tangse. Banjir bandang kembali berkunjung yang ketika itu diperkirakan 26 orang hanyut dan ribuan lainnya harus menggungsi. Padahal hanya berselang 11 bulan dari sebelumnya. 25 Februari 2012 kembali menjadi tanggal bersejarah bagi warga Tangse. Setahun berselang, Tuhan kembali menguji masyarakat Tangse. Kali ini, gempa berkekuatan 5,6 SR mengguncang Tangse dan dua kecamatan lainnya pada hari Selasa, 22 Oktober 2013. Dalam catatan Sarjani, sang Bupati Pidie saat itu, 368 rumah rusak dan 11 Gampong ikut berdampak akibat gempa. Paska gempa, banjir dan tanah longsor kembali menyambangi masyarakat Tangse pada 10 Desember 2015. Gampong Sarah Panyang, Blang Pandak, Blang Bungong dan juga Blang Dhot menjadi daerah terparah dampak bencana. Ratusan log kayu dan lumpur mengendap akibat banjir. Kemudian,

masyarakat Tangse lagi lagi harus merayakan awal tahun dengan musibah yang sama, Banjir Bandang datang pada Minggu, 26 Februari 2017. Terakhir, dipenghujung tahun 2018, bencana banjir tersebut kembali menjamah masyarakat, puluhan rumah terendam dan ratusan warga harus mengungsi [3].

Terkait itu, pada dasarnya bencana adalah satu fenomena yang bersifat abadi karena sampai kapan pun peristiwa ini akan terus terjadi. Ada bencana yang dapat di cegah (diupayakan untuk tidak terjadi), namun ada pula bencana yang tidak dapat dihindari, sehingga manusia hanya dapat berusaha mengantisipasi supaya tidak terjadi korban harta dan jiwa. Kata bencana atau disaster secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ‘dus’—buruk— dan ‘aster’—bintang’. Kemudian kata itu diserap menjadi bahasa Perancis ‘desastre’ yang berarti kerusakan, terutama yang disebabkan oleh peristiwa [4]. Secara konseptual, bencana dapat dipahami sebagai suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan maupun penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut senada dengan pendapat Naomi Zack [5] yang mengartikan bencana sebagai suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang merugikan dan menyebabkan kematian sejumlah besar orang, dan dapat terjadi secara kebetulan atau atas kesengajaan manusia. Dalam perkembangannya, konsep dan definisi bencana telah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya minat para peneliti dalam mengkaji fenomena bencana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Tangse pada dasarnya adalah bencana yang dapat dicegah selama manusia atau masyarakat mampu memahami watak-watak alam yang ada disekelilingnya. Banjir tentu bukan kesalahan air, namun terjadi karena manusia tidak memberikan hak air untuk mengalir menuju laut dan meresap ke dalam tanah. Sungai sebagai tempat mengalirnya air dipenuhi oleh sampah, sedangkan tempat untuk meresap dibuat perumahan atau bangunan dari beton, pohon dan hutan sebagai penyangganya ditebangi dengan cara yang tidak bertanggung jawab [6]. Kiranya demikian pula lah akar dari bencana yang terjadi di Kecamatan Tangse. Data dari Wahana Lingkungan Hidup Aceh menunjukkan terdapat 679 kejadian banjir di Aceh dalam kurun waktu 2007-2012. Dalam catatan mereka, penyebab utama kejadian musibah banjir di berbagai tempat ini akibat deforestasi hutan yang sangat tinggi dan semakin meningkat setiap tahun hingga berkisar 1.000 Ha [7]. Pada masa konflik, daerah Tangse yang dikelilingi pegunungan menjadi salah satu tempat strategis. Kondisi hutan Tangse yang “menyediakan” banyak kayu juga menjadikannya sebagai daerah yang cukup banyak dijajah sekaligus sebagai tempat “transaksi” pada masa itu. “Pada masa konflik Aparat dan GAM telah sama-sama memperkosa hutan, GAM yang tebang kayu, aparat yang beli”, ujar seorang Imam Mukim dan sekaligus mantan anggota GAM di Tangse. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa praktek sosial yang mengundang datangnya bencana tidak dimulai dalam waktu yang singkat dan hancurnya hutan Tangse yang kemudian menjadi sumber bencana sudah dimulai sejak lama. Sehingga jika saat ini terjadi bencana yang rutin terjadi, hal tersebut sebenarnya sudah diprediksi datangnya.

Kehancuran hutan Tangse yang menjadi sumber penyangga air menjadi semakin parah pasca konflik dan tsunami ketika aktivitas penebangan liar berlangsung semakin massif dengan melibatkan berbagai peralatan modern. Peningkatan kerusakan hutan Tangse ini secara sosiologis dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ekonomi, politik maupun sosial yang mengalami pergeseran pasca konflik dan tsunami. Kondisi yang mencekam pada masa konflik membuat aktivitas masyarakat menjadi sangat terbatas dan terpaksa meninggalkan area perkebunan mereka. Sehingga, perkebunan yang sempat menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat Tangse berubah menjadi hutan dan semak belukar. Setelah konflik usai dan kondisi Aceh semakin kondusif, masyarakat tidak lagi kembali ke perkebunan yang dulu pernah mereka kerjakan karena akses menuju perkebunan yang ada di kawasan hutan telah rusak. Disisi lain permintaan kayu sangat tinggi saat itu karena pasca tsunami geliat pembangunan di Aceh meningkat. Hal ini mendorong masyarakat untuk melakukan penebangan kayu di hutang Tangse karena sangat menguntungkan dan membawa berkah ekonomi secara instan. Dampaknya adalah terjadi penebangan liar secara massif yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan hal ini secara perlahan mengubah pola mata pencaharian masyarakat serta membuat hutan-hutan yang ada menjadi gundul. Singkatnya, ekonomi kayu yang menjanjikan pasca tsunami secara perlahan berhasil mengubah pola mata pencaharian masyarakat yang akhirnya menjadi aktivitas “pengundang” bencana. “gimana mau kita cegah, kalau bencana itu kita yang undang” ungkap salah seorang ketua mukim [8].

### 3.2. Respon Masyarakat dan Pemerintah

Suatu bencana selalu mendapatkan respon berlainan dalam masyarakat. Respon tersebut dipengaruhi oleh konstruksi makna yang berbeda oleh masing-masing pihak dalam memahami bencana dan dipengaruhi oleh kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam menentukan bentuk wacana sehingga makna bencana itu sendiri menjadi arena pertarungan kepentingan [1]. Dalam perkembangannya konstruksi makna bencana yang melahirkan persepsi tentang bencana dalam kajian bencana dapat dilihat dalam tiga persepektif. Pertama; kehadiran bencana di lihat sebagai sesuatu yang mengancam atau sebagai musuh yang datang dari luar kelompok masyarakat. Persepektif ini melahirkan pandangan bahwa bencana merupakan sebuah agresi dari luar yang dalam batas tertentu harus dilawan agar tidak menimbulkan akibat yang lebih parah. Dengan konstruksi berpikir demikian, masyarakat kemudian menempatkan bencana sebagai musuh dan salah satu cara dalam mengatasinya, melawannya disamping meredam setiap akibat yang ditimbulkannya. Kedua; memandang bahwa bencana merupakan ekspresi dari kerentanan

sosial masyarakat yang kemudian berpengaruh besar terhadap lahirnya bencana. Perspektif ini juga memandang bencana selalu menimpa kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap resiko yang muncul, seperti orang-orang kelas bawah di pemukiman-pemukiman padat, kaum miskin. Ketiga; bencana dilihat sebagai pintu masuk ke dalam keadaan ketidakpastian. Perspektif ini berkembang pada konteks korban dimana bencana dianggap sebagai kenyataannya selalu datang tanpa disangka-sangka. Bencana dalam konteks korban ini mirip dengan tragedi di mana manusia bisa meramal kejadiannya, namun ramalan itu pernah sungguh akurat, sehingga masyarakat hanya menanggulangnya semampunya sedangkan resiko bencana berupa kerusakan dan kesedihan tetap saja tidak dapat dihindarkan. Ketiga paradigma diatas merupakan titik tolak dari upaya berbagai respon dalam mengatasi bencana yang kemudian mendapatkan bentuknya dalam respon individual dan institusional, respon kebudayaan, respon politik dan kekuasaan dan respon yang bersifat ekonomi [9].

Terkait itu, respon individual maupun kelompok terhadap bencana di Tangse pada dasarnya tampak pada tingkah laku individu dan kelompok dimana masyarakat hanya bisa pasrah atas bencana yang menimpa mereka. Pasrah karena secara mental kerangka berpikir masyarakat Tangse ketika bencana menghampiri diliputi oleh realitas yang menyedihkan. Namun ketika bencana tersebut terjadi secara berulang-ulang, kesedihan berubah menjadi sesuatu yang biasa saja karena selalu dialami setiap tahun. "Banjir sudah pasti terjadi, pokoknya kalau sudah mau akhir tahun, sudah masuk bulan yang 'ber, ber' itu, september sampai desember, kita sudah siap-siap, karena sudah pasti banjir, mau kecil atau besar itu sudah pasti", ungkap salah seorang tokoh masyarakat Tangse [8]. Apa yang di utarakan tokoh masyarakat tersebut menunjukkan bahwa dampak rutinitas bencana yang terjadi telah melahirkan makna baru bagi masyarakat Tangse, yaitu sebagai suatu rutinitas tahunan yang sudah dipersiapkan dan disambut kedatangannya. Hal ini setidaknya mengkonfirmasi bahwa secara sosial masyarakat menyadari bahwa bencana banjir tersebut merupakan sesuatu yang diundang kedatangannya sehingga sudah diprediksi kedatangannya. Singkatnya, terjadi reproduksi makna dalam melihat bencana akibat dari rutinisasi yang mereka alami selama bertahun-tahun.

Dari sisi kelembagaan, pemerintah telah memberikan respon yang cukup positif dimana rencana pola ruang yang dirumuskan oleh pemerintah Kabupaten Pidie secara tegas mengklasifikasikan pola tata ruang dan wilayah yang ada, termasuk tata ruang dan wilayah untuk Kecamatan Tangse. Namun, kondisi lapangan menunjukkan bahwa kawasan hutan lindung dan konservasi sebagai kawasan seharusnya steril dari aktivitas penebangan liar, pada kenyataannya masih terjadi penebangan liar secara massif. Salah satu kawasan hutan lindung di daerah Tangse misalnya malah menjadi kawasan hutan yang paling banyak dirusak oleh aktivitas penebangan liar. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pidie, Ir M Hasan Yahya, menyebutkan lebih kurang 500 hektare kawasan hutan lindung di Kecamatan Tangse telah rusak akibat maraknya penebangan liar pada tahun 2012. Ia menambahkan bahwa dari luas keseluruhan hutan lindung Tangse 54.729 hektare, kini sudah mencapai 500 hektare yang telah gundul karena terus-terusan ditebang".

Yanti [10] dalam penelitiannya tentang Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Bencana di Kecamatan Tangse menyatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan terkait bencana tidak maksimal dipengaruhi oleh beberapa kendala yaitu belum adanya standar operasional prosedur (SOP) terkait penanggulangan bencana, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, kurangnya sumber dana dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait bencana. Namun demikian, secara normatif upaya pencegahan datangnya bencana di Tangse masih dilakukan secara terus menerus oleh pihak pemerintah melalui BPBD Pidie maupun BNPB dengan turut melibatkan unsur-unsur lokal seperti LSM, pemerintah Gampong dan tokoh-tokoh setempat. Bahkan dokumen terkait pemetaan dan penganggulangan bencana dengan mudah kita akses. Pemerintah melalui BPBD dan BNPB juga telah melakukan serangkaian sosialisasi tentang mitigasi bencana. Sosialisasi tersebut dilakukan disekolah dan beberapa tempat atau daerah yang rawan maupun terdampak bencana. Bahkan papan-papan pengumuman tentang pentingnya menjaga hutan, menghentikan penebangan liar serta jalur-jalur evakuasi ketika bencana datang menjadi pemandangan yang sangat mudah kita temui di sepanjang jalan di Kecamatan Tangse. Tetapi himbauan-himbau tentang bahaya menebang pohon ataupun dampak kerusakan alam bagi hanya menjadi plakat-plakat yang kehilangan makna. Karena dibelakang itu, aktivitas penebangan masih berlangsung dan bahkan didukung oleh "oknum-oknum" tidak bertanggung jawab yang seharusnya turut mengkampanyekan bahaya illegal logging bagi masyarakat. Selain itu, upaya razia kepada para penebang liar juga terus diupayakan oleh pihak terkait. Namun usaha tersebut nampak tidak cukup memberikan efek positif. menurut pengakuan beberapa responden, aksi razia yang dilakukan oleh pihak terkait terkesan tidak maksimal karena sebelum razia dilakukan, informasi terkait titik razia sudah menyebar kepada masyarakat dan tentunya para penebang kayu juga sudah mengetahuinya. Sehingga aksi razia yang dilakukan dilihat oleh sebagian masyarakat Tangse sebagai salah satu bentuk usaha yang sia-sia, karena "mana mungkin informasi razia "bocor" jika tidak dibocorkan oleh salah satu oknum dari kelompok mereka sendiri", ujar salah seorang tokoh masyarakat Tangse [8].

Hasil survey yang dilakukan oleh Mujani [11] pada tahun 2016 terkait peran pemerintah dalam menanggulangi illegal logging dikecamatan Tangse menunjukkan komitmen pemerintah yang rendah dalam mengantisipasi aktivitas illegal logging, yaitu hanya 18,25 %, pelaksanaan program hanya 11,11% dan penindakan terhadap pelaku atau sanksi hanya berada pada angka 7,41%. Angka-angka tersebut tentu mengindikasikan lemahnya komitmen pemerintah dan tidak sebanding dengan hancurnya hutan serta dampak bencana yang di harus ditanggung. Komitmen pemerintah dan aparat pada tataran implementasi kebijakan yang lemah kemudian melahirkan respon negatif masyarakat terhadap pemerintah terkait aktivitas penebangan liar yang terjadi. Dalam survey yang sama, Mujani menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Kecamatan Tangse berada pada kategori rendah,

penanggulangan illegal logging pun masih belum memadai karena belum adanya program yang nyata serta sanksi tegas bagi para pelaku illegal logging di Kecamatan Tangse tersebut.

Berdasarkan hasil FGD dan wawancara yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa selain aspek sosial ekonomi masyarakat yang sudah tergantung pada ekonomi kayu, faktor lain yang menyebabkan rendahnya perhatian masyarakat terhadap illegal logging adalah faktor penegakan hukum. Penegakan hukum yang lemah diakui masyarakat menjadi faktor yang membuat aktivitas penebangan liar meraja lela. Bahkan, penebangan liar yang melibatkan oknum aparat penegak hukum telah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Tangse. Tidak jarang pelaku-pelaku Illegal logging tersebut di support oleh oknum-oknum tertentu sehingga aktivitas penebangan berjalan dengan lancar dari proses penebangan hingga distribusinya. Padahal masyarakat Tangse mengetahui dan menyadari bahwa penyebab bencana banjir yang datang setiap tahun itu adalah karena penebangan liar. Salah seorang anggota masyarakat sekaligus elit agama Gampong Layan menyatakan;

“mereka (oknum aparat) bekerja sama motong kayu, malam-malam kayu dibawa ke bireun, lhokseumawe, bernun, padahal di sepanjang jalan itu ada pos-pos aparat tapi tidak ada teguran dari mereka, itulah kelemahan dari masyarakat, jadi masyarakat berbondong-bondong motong kayu” [12]

Dengan kondisi yang demikian, upaya mengurangi resiko bencana di Kecamatan Tangse yang diinisiasi oleh pemerintah maupun masyarakat setempat menjadi kehilangan substansinya. Karena kemudian usaha pemerintah dan masyarakat untuk tidak kembali terjebak dalam pusaran bencana menjadi sia-sia selama akar atau penyebab datangnya bencana tidak dihilangkan. Pada akhirnya mitigasi bencana tidak menjadi serangkaian upaya sistematis untuk menanggulangi resiko bencana yang pada ujung-ujungnya dapat menghilangkan bencana tersebut. “Proyek penyadaran” kepada para korban bencana pun sia-sia karena aktivitas pengundang bencana terus dilakukan “secara berjamaah”.

### 3.3. Dialektika Masyarakat dan Bencana

Hujan yang turun dalam intensitas tinggi, juga licinnya tanah gunung sebenarnya sudah cukup bagi masyarakat sekitar Tangse untuk mengetahui bahwa akan ada banjir besar yang terjadi. Apalagi pengalaman masa lalu telah mengajarkan mereka tentang itu. Lantas, pengetahuan dan pengalaman tentang bencana hanya menjadi fenomena tahunan biasa yang juga disikapi secara biasa. Untuk menghadapi bencana banjir, masyarakat Tangse “hanya” mempersiapkan bekal pakaian dalam satu tempat yang kemudian mereka pindahkan ke rumah saudara yang dianggap aman dan tidak tersentuh bencana. Dalam hal ini, masyarakat Tangse hanya mengobati gejala-gejala sosial yang menggagu –bencana-, namun tidak pernah mau menghilangkan sumber dari penyakit itu sendiri. Oliver-Smith dalam [13] menyatakan bahwa tingkat integrasi masyarakat dan corak pengetahuan lokal menjadi dasar bagi kemampuan pemulihan dalam mengurangi kerugian bencana jangka pendek dan jangka panjang. Gagasan ini didasarkan pada asumsi bahwa pengetahuan adalah sistem nilai yang mengandung pilihan-pilihan tindakan adaptif bagi masyarakat dalam perjuangan menghadapi berbagai permasalahan kehidupan mereka. Pengetahuan yang dimaksud diasumsikan sebagai pengetahuan yang terbentuk atas dasar pengalaman bersama yang bersifat integral bagi kelangsungan sistem sosial pendukungnya. Sebelum bencana banjir bandang memporak-porandakan Tangse pada Maret 2011 yang kemudian berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, masyarakat Tangse sebenarnya telah memiliki pengalaman tentang bencana meski intensitas dan dampaknya terlalu signifikan. Berdasarkan penuturan Fahrudin Umar, bencana banjir yang menimpa Kecamatan Tangse selama beberapa tahun terakhir bukanlah yang pertama kali terjadi. Pada tahun 1971 bencana banjir bandang pernah terjadi di Kecamatan Tangse, namun bencana tersebut tidak sampai menelan korban ataupun merusak infrastruktur yang ada.

Fahrudin Umar, Tokoh Adat Tangse menceritakan;

“Bencana terjadi tidak tentu, kadang 5 tahun sekali, 10 tahun atau bahkan 20 tahun sekali. Pada tahun 71 pernah terjadi banjir bandang tapi tidak merusak infrastruktur, mungkin karena sekarang banyak genangan dan sekatan air. Dulu gak ada mesin penggiling padi, masyarakat waktu itu sering membuat kincir air di aliran sungai untuk membangkitkan mesin penumbuk padi. Jadi ketika air masuk tertahan oleh kincir yang berjejeran dan memperlambat arus air tapi sekarang sudah tidak ada lagi.” [14]

Kehidupan masyarakat Tangse yang dekat dengan alam dan lingkungan membuat banjir bandang yang datang tidak berubah menjadi bencana atau musibah yang berarti bagi masyarakat. Kala itu, masyarakat Tangse masih begitu dekat dan bersahabat dengan aliran sungai. Mata pencaharian masyarakat yang mayoritas bertani membuat aliran sungai menjadi salah satu sumber utama aktivitas pertanian. Selain sebagai sumber pengairan dan irigasi, masyarakat Tangse juga menjadikan aliran sungai sebagai salah satu sumber teknologi pengolahan hasil panen secara tradisional. Sebagaimana cuplikan wawancara di atas, bahwa pada masa itu masyarakat membangun kincir-kincir kecil disepanjang aliran sungai untuk dijadikan sebagai alat pembangkit penumbuk padi, dan keberadaan kincir-kincir tersebut dapat menghambat arus air yang ada dan sekaligus membuat masyarakat menjaga aliran sungai agar tetap bersih dan bebas dari sampah. Ketika terjadi banjir, laju air yang datang berhasil dihambat oleh banyaknya kincir-kincir yang ada disepanjang aliran sungai tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa banjir bandang yang pernah terjadi kala itu tidak berubah menjadi bencana bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, kincir-kincir yang dulu berjejeran di sepanjang aliran sungai mulai diganti dan tergantikan oleh teknologi-teknologi modern. Mesin penggilingan padi modern secara pelan tapi pasti menggantikan teknologi klasik tradisional yang pernah dipraktikkan masyarakat Tangse dalam mengolah hasil panen mereka.

Dampak perubahan ini adalah beralihnya perhatian masyarakat dari aliran sungai itu sendiri. Ketika kincir masih berdiri, hampir setiap hari masyarakat bersinggungan dengan aliran sungai sehingga sampah kecil maupun besar yang mengganggu aliran sungai akan cepat dibersihkan. Namun saat ini kincir itu sudah tak ada lagi, perhatian masyarakat kepada aliran sungai pun sudah tak seperti dulu lagi. Aliran sungai tak terawat, sampah-sampah bertumpukan dan pendangkalan pun terjadi. Apalagi penebangan liar yang terjadi di hulu-hulu sungai terjadi semakin massif. Akibatnya sampah-sampah kayu yang berupa balok maupun serpihan hasil penebangan menumpuk dan memenuhi aliran sungai. Penumpukan ini tentu menghambat aliran air, dan ketika hujan turun deras, volume air bertambah, sampah kayu hasil penebangan terseret air dan akhirnya menghantam perumahan dan persawahan yang ada di sekelilingnya.

Cerita singkat di atas menunjukkan bahwa kehadiran teknologi dalam balutan modernitas adalah tamsilan pisau bermata dua. Jika tidak digunakan sesuai fungsi, maka akan berakibat fatal bagi kehidupan. Pun begitu dalam menyikapi kemajuan teknologi, jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan maka selalu ada harga yang harus dibayar. Apa yang disampaikan Fakhruddin di atas bisa menjadi satu contoh. Sebelum mesin penggiling padi hadir di Tangse, masyarakat setempat menggunakan kincir angin yang digerakkan secara tradisional menggunakan tenaga air. Masyarakat mampu “bekerjasama” dengan alam. Ketika sungai-sungai di Tangse banyak diisi dengan kincir, maka laju dan tekanan air ketika datang air bah akan tertahan oleh kincir-kincir tersebut, sehingga kekuatan dan tekanan air menjadi berkurang. Jika pun airnya terlalu besar dan harus meluap ke pemukiman, namun dari segi tekanan dan kekuatan air akan berkurang. Zaman dulu, dialektika kultur, natur dan struktur berjalan seimbang yang mampu menciptakan keharmonisan.

Perubahan tak dapat ditolak, tapi kebijaksanaan terhadap perubahan itu penting. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Tangse mulai mengenal mesin penggiling padi dan meninggalkan system tradisional. Di sisi yang lain, sesuatu yang sudah menjadi pengetahuan kolektif bagi masyarakat pada tata kelola sumber energy air secara bermanfaat –dan manfaat terbesar bisa mengatur kekuatan air sungai- tidak dipikirkan untuk sehingga jika musim penghujan tiba, maka masyarakat harus siap-siap dengan debit air yang lebih. Bukan hanya persoalan kincir, moda produksi dalam menebang pohon juga sangat berpengaruh. Dulu, ketika masyarakat masih mengandalkan parang dan kampak untuk memotong kayu, maka jenis-jenis kayu yang bisa dipotong juga terseleksi secara otomatis. Artinya, diameter batang pohon, tinggi pohon, besar pohon selalu menjadi pertimbangan karena hanya menggunakan alat pemotong yang terbatas. Sementara hari ini, alat berat eskavator terlihat mengisi beberapa titik untuk land clearing dan ditanami tumbuhan lainnya. Masuknya teknologi chainsaw juga berperan penting dalam melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Kemajuan yang tidak disikapi dengan kebijaksanaan selalu melahirkan kecacatan sosial. Berubahnya moda produksi masyarakat Tangse juga berkaitan erat dengan pola hidup di masyarakat tersebut. Gaya hidup yang instan, ingin serba cepat, dan tanpa pertimbangan efek samping yang ditimbulkan menjadi pilihan beresiko yang jauh dari kata aman. “orang tangse mencari uang ingin cepat dan mudah dengan membawa minyak satu jerigen lalu masuk hutan, tebang pohon”, kata tokoh pemuda Gampong Peunalom. Si pemilik modal hanya menyediakan modal awal yang dibutuhkan untuk pekerja di lapangan.

Terkait itu, menurut Featherstone [15] pergeseran masyarakat modern bisa dilihat dari beberapa indikator, yaitu: 1) dominannya nilai simbolis suatu barang; 2) lahirnya proses estetisasi life style; dan 3) memudarnya system referensi tradisional. Dalam konteks ini, upaya meninggalkan system kincir air untuk proses penggilingan padi bisa dilihat sebagai salah satu upaya meninggalkan system tradisional dan kearifan yang pernah hidup di wilayah tersebut suatu ketika. Kemudian, pergerakan teknologi yang begitu cepat dan modern secara otomatis “memaksa” masyarakat untuk beralih pada sumber-sumber ekonomi yang instan. Pada masa lalu ketika handphone, televisi, internet dan perangkat teknologi canggih lainnya berlum menyentu masyarakat, kebutuhan ekonomi dapat diseimbangkan dengan produksi pertanian yang dihasilkan, sehingga menbang pohon hanya dilakukan sebagian kecil masyarakat dan bersifat skunder.

Fahrudin Umar, Tokoh Adat Tangse menceritakan;

“Dulu masyarakat bisa dilarang nebang pohon, karena dulu semua orang punya motor, handphone gak ada, paket data tidak perlu beli, token listrik pun gak beli. Masak cukup pake kayu bakar gak perlu gas. Sekarang, bensin lah, pulsa, paket internet sudah jadi kebutuhan sehari-hari. Kalau hanya berharap dari hasil pertanian ya gak cukup. Tapi kalo dari kayu, hari ini nebang, hari ini tarik kayu dari hutan, besoknya sudah dapat duit. Sudah bisa beli pulsa.” [14]

Kini, sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya pada kayu yang ada di hutang Tangse. Meski sebagian besar hutan Tangse adalah kawasan lindung, tetapi kehancurannya sudah tidak terelakkan. Masyarakat sudah terlanjur menikmati mudahnya mendapat uang dari menjual kayu, sehingga cukup sulit untuk kembali ke lahan pertanian. Jika pun kembali, pertanian itu bukan lagi yang utama. “Saat ini kayu adalah sumber ekonomi utama masyarakat” tutur salah seorang Geuchik (Kepala Desa). Lahan pertanian dan perkebunan memang masih tersedia, namun kayu dianggap jauh lebih menjanjikan karena dapat diperoleh dengan cepat. Sedangkan pertanian membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, apalagi perkebunan yang aksesnya saja membutuhkan perjuangan. Akhirnya komoditas pertanian hanya dilirik sebagai sumber skunder dan kayu tetap menjadi sumber primer ekonomi masyarakat. Ada indikasi bahwa secara objektif informasi mengetahui dan memiliki pengetahuan mengenai bencana alam melalui melalui pengalaman objektif mereka terhadap bencana namun karena telah terjadi rutinitas dan sumber datangnya bencana sulit untuk dihilangkan maka pengetahuan tersebut menjadi tidak aplikatif dan menjadi “pengetahuan tak berbekas” meski masyarakat Tangse sangat menyadari bahwa wilayah mereka merupakan zona rawan bencana.

Perjalanan historis masyarakat Aceh dari konflik hingga damai secara pelan tapi pasti telah mengubah landscape kehidupan sosial masyarakat Tangse. Cara pandang masyarakat dalam melihat hutan sebagai ruang yang menjaga kehidupan dengan segala sumberdaya nabati, berubah menjadi ruang-ruang penyedia modal bagi produksi yang mereka pikirkan untuk terus dieksploitasi. Perubahan inilah yang kemudian melahirkan praktek illegal logging tanpa memperhatikan kearifan dan nilai-nilai lingkungan sehingga berdampak pada datangnya bencana. Saat ini, eksplorasi kayu di kecamatan Tangse telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, dan upaya-upaya tersebut sudah jauh dari kebiasaan yang pernah mereka praktikkan dahulu. Hal ini sejalan dengan asumsi Berger dan Luckmann [16] yang mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu kenyataan objektif yang di dalamnya terdapat proses pelembagaan yang dibangun dengan pembiasaan (habitualisation). Jika habitualisasi atau pembiasaan ini terus berlangsung maka akan terjadi pengendapan dan menjadi suatu tradisi.

Akhirnya bencana dianggap sebagai suatu “berkah” tersendiri. Jika terjadi bencana berarti bantuan akan datang, jika bantuan datang, berarti “proyek” tanggap darurat bencana siap dijalankan. “Kalau sudah banjir di Tangse, tinggal kontek kantor; nyo ka banjir, peng jalan ka na peng jalan”, ujar salah seorang anggota Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Pidie. Pernyataan tersebut setidaknya menyiratkan bahwa bencana telah menjadi lahan baru sebagai komoditi. Bahkan memang sudah umum dalam masyarakat bahwa “selalu ada berkah dan hikmah dibalik setiap bencana”. Bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan dan kerugian pada masyarakat, namun pada bencana selalu ada manfaat dan juga keuntungan yang sedikit banyak dirasakan oleh sebagian kalangan masyarakat manakala bencana melanda. Oleh sebab itu, dalam setiap bencana, selain ada pihak-pihak yang menjadi korban dan mederita (the loser), banyak juga yang menjadi the winners [1]. Mobilisasi bantuan-bantuan paskabencana gencar dilakukan secara sendiri-sendiri, dalam institusi-institusi berbeda maupun pemerintah, namun seringnya malah bantuan-bantuan tersebut terutama makanan dan obat-obatan kebanyakan terbuang, kadaluarsa dan rusak. Bencana sudah tidak hanya merupakan berkah bagi sebagian kalangan tapi kemudian sudah berubah menjadi asset yang layak diperhitungkan. Bencana dan sumber bencana di Tangse merupakan arena baru ekonomi yang mampu membawa keuntungan yang jauh lebih besar. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa kapitalisme bencana tidak hanya mengambil kesempatan di atas bencana dalam meraup keuntungan, tetapi bencana sebagai komoditi telah mengisyaratkan harusnya terjadi bencana.

#### 4. Penutup

Banjir tentu bukan kesalahan air, namun terjadi karena manusia tidak memberikan hak air untuk mengalir menuju laut dan meresap ke dalam tanah. Sungai sebagai tempat mengalirnya air dipenuhi oleh sampah dan hutan sebagai penyangganya ditebangi dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Demikian pula lah akar dari bencana yang terjadi di Kecamatan Tangse. Hujan yang turun dalam intensitas tinggi, juga licinnya tanah gunung sebenarnya sudah cukup bagi masyarakat sekitar Tangse untuk mengetahui bahwa akan ada banjir besar yang terjadi. Namun, pengetahuan dan pengalaman tentang bencana hanya menjadi fenomena tahunan biasa yang juga disikapi secara biasa, yakni “hanya” mempersiapkan bekal pakaian dalam satu tempat yang kemudian mereka pindahkan ke rumah saudara yang dianggap aman dan tidak tersentuh bencana.

Perjalanan historis masyarakat Aceh dari konflik hingga damai secara pelan tapi pasti telah mengubah landscape kehidupan sosial masyarakat Tangse. Permintaan kayu sangat tinggi pasca tsunami akibat geliat pembangunan di Aceh mendorong masyarakat untuk melakukan penebangan kayu di hutang Tangse yang kemudian mengubah pola mata pencaharian masyarakat serta membuat hutan-hutan yang ada menjadi gundul. Cara pandang masyarakat dalam melihat hutan berubah menjadi ruang-ruang penyedia modal bagi produksi yang mereka pikirkan untuk terus dieksploitasi semakin menyuburkan praktek illegal logging tanpa memperhatikan kearifan dan nilai-nilai lingkungan sehingga berdampak pada datangnya bencana.

Meski berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan unsur terkati untuk mencegah hingga mengurangi resiko bencana yang menimpa masyarakat, namun ketika bencana semakin akrab menyapa masyarakat, maka pergeseran cara pandang masyarakat terhadap bencana pun terjadi. Akibatnya, meski ada kesadaran tentang resiko bencana, namun hal itu tidak membuat masyarakat menghentikan aktivitas yang mengundang datangnya bencana.

#### Referensi

- [1] Abdullah, I. (2006, November 13). *Dialektika Natur, Kultur dan Struktur: Analisis Konteks, Proses dan Ranah dalam Konstruksi Bencana*. Yogyakarta.
- [2] Giddens, A. (2010). *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [3] Hanafiah, J. (2015). *Tangse yang kini akrab bencana*. Retrieved 09 25, 25, from www.mongabay.co.id: <http://www.mongabay.co.id/2015/12/20/Tangse-yang-kini-akrab-bencana/>
- [4] Indiyanto, A., & Kuswanjono, A. (2012). *Agama, Budaya dan Bencana*. Bandung: Mizan Pustaka.
- [5] Naomi, Z. (2009). *Ethics for Disaster*. USA: Rowman & Littlefield Publisher.Inc.
- [6] Kuswanjono, A. (2012). Bencana dalam Persepektif Filsafat Moral. In A. Indayanto, & A. Kuswanjono, *Agama, Budaya dan Bencana* (pp. 291-312). Bandung: Mizan Pustaka.
- [7] Burhanuddin, M. (2012). *Banjir Tangse, Harga Sebuah Kelalaian*. Retrieved 09 25, 2018, from kompas.com: <http://regional.kompas.com/read/2012/03/01/11242326/banjir.Tangse.harga.sebuah.kelalaian>
- [8] Focus Group Discussion (FGD) bersama Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat Kepala Desa dan masyarakat Kecamatan Tangse pada bulan September 2018
- [9] Sabir, A., & Phill, M. (2016). Gambaran Umum Persepsi Masyarakat terhadap Bencana. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 5(3), 304-326.

- [10] Yanti, F. (2014). *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam Pelaksanaan Program Tanggap Darurat untuk Penanganan Bencana di Kecamatan Tangse tahun 2013*. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala.
- [11] Mujani. (2016). *Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Penebangan Liar (Illegal Logging): Studi Kasus di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie*. Banda Aceh: Fisipol, Universitas Syiah Kuala.
- [12] Wawancara dengan Tokoh Agama Kecamatan Tangse, Bapak Abu Bakar Yusuf pada bulan September 2018
- [13] Yulkardi, Yunarti, Budiono, A., & Putra, A. (2012). Pengalaman Bencana Alam dan Sistem Tindakan Masyarakat: Persepsi dan Pola Respon. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 12(1), 117-131.
- [14] Wawancara dengan Tokoh Adat Kecamatan Tangse, Bapak Fachrudin Umar pada bulan September 2018
- [15] Abdullah, I. (2010). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [16] Berger, P. L., & Luckmann, T. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.